

# **PENGARUH ASAN-FREE TRADE AREA TERHADAP PERTUMBUHAN EKPOR CRUDE PALM OIL INDONESIA 2003-2012**

**Ria Febrianti**

**Email: Riafebrianti10@yahoo.co.id**

**Pembimbing: FAISYAL RANI, S.IP.,MA**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasionaional FISIP Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H.R.Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/fax.0761-63277

## **Abstract**

*International trade that used in traditional and limited, now has progressed very rapidly. The flow of goods can not be blocked even by doing a free trade agreement. Trade liberalization is intended for all countries in the world, has long been discussed by the experts of the economy and also the leaders of the countries in the world. Attempts to bring this AFTA born of thinking about how to improve relationships (and also co-operation), especially in the economic field, which is closely among ASEAN member countries. Entry AFTA will certainly impact the economic actors in each member state. The purpose of this study was to determine the influence of ASEAN Free Trade Area (AFTA) on the growth of Indonesia's CPO exports Period 2003-2012. The results showed that regional cooperation in the form of regional organization is still an option This is due to the inability of developing countries to deal with the complex development of international relations and the notion that regionalism can increase the level of the economy. Indonesia as a country that is known as a producer of CPO feel the influence of the enactment of AFTA significantly to the development of palm oil exports. Given the opportunity CPO industry is promising, it is expected the Indonesian government to focus on comparative and competitive advantages possessed.*

**Kata kunci: Asean Free Trade Area, Crude Palm Oil**

## **LATAR BELAKANG**

Perdagangan internasional yang dulunya dilakukan secara tradisional dan terbatas, sekarang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Aliran barang semakin tidak bisa dibendung dengan dilakukannya perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan berupa tarif, quota, larangan impor, damping dan berbagai bentuk kebijakan proteksi ekonomi. Tidak hanya itu, perjanjian ini

juga dimaksudkan untuk mempererat hubungan kerjasama diantara kedua pihak yang terlibat di dalamnya yang turut menentukan hubungan kedua pihak di masa depan. Akibatnya aliran barang semakin tidak bisa dibendung dengan dilakukannya perjanjian perdagangan bebas.

Sampai saat ini, perdagangan bebas merupakan *issue* yang kontroversial khususnya di negara-negara berkembang. Perdagangan bebas dianggap akan mampu meningkatkan standar hidup melalui

keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar, perdagangan perdagangan bebas juga dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain yang berarti memperkecil kemungkinan perang, perdagangan bebas dianggap mampu menciptakan pasar persaingan yang sempurna. Sedangkan di sisi lain, perdagangan bebas dianggap merugikan negara berkembang karena memungkinkan negara maju karena memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial.

Liberalisasi perdagangan yang ditujukan bagi semua negara di dunia, telah lama diperbincangkan oleh para ahli perekonomian dan juga para pemimpin negara-negara di dunia. Tiap negara berusaha mencari sistem perdagangan internasional, bagaimana formulasi landasan dasar perdagangan antar negara dilakukan dalam penerapannya yang pada akhirnya dapat membawa manfaat yang signifikan dan adil kepada seluruh negara yang melakukan pengembangan perekonomiannya keluar dari negaranya masing-masing.

Perekonomian dunia mengalami proses liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan mulai terbentuknya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 yang kini peranannya telah digantikan oleh *World Trade Organization* (WTO). Perdagangan yang lebih liberal tampaknya menjadi tujuan hampir sebagian besar negara di dunia, dengan harapan liberalisasi dapat meningkatkan volume dan nilai perdagangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Liberalisasi perdagangan salah satunya ditandai dengan penurunan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non tarif. Hambatan perdagangan

penting untuk dihapuskan karena tanpa hambatan dapat mendorong arus pergerakan barang dan jasa (*flow of goods and services*).

Mengingat perkembangan ekonomi dunia yang semakin *interdependent* dan *global* memberikan konsekuensi meningkatkan arus perdagangan barang dan uang antar negara. Terlebih lagi jika negara ingin memperluas pangsa pasarnya. Hal tersebut terbukti bahwa semakin banyak perjanjian perdagangan bebas yang telah dilakukan baik secara bilateral maupun regional. Tercatat sebanyak 221 perjanjian perdagangan bebas telah disepakati sejak tahun 1991 sampai 2010<sup>1</sup>. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 152 perjanjian dari tahun 2002 yang hanya berjumlah 69 perjanjian. Peningkatan jumlah perjanjian bilateral dan regional ini mengalami peningkatan disebabkan karena keduanya merupakan opsi terbaik kedua bagi *free trade area* (FTA) setelah perjanjian multilateral, karena implementasi perjanjian multilateral sulit untuk sepenuhnya diterapkan demi memperkuat ekonomi dengan negara lain.

Negara-negara Asia Tenggara dalam kerangka ASEAN merupakan salah satu organisasi regional yang aktif melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan negara ataupun kawasan lain. Meskipun didominasi oleh negara-negara berkembang namun, ASEAN menyadari akan integrasi ekonomi yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, ASEAN berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Tercatat hingga saat ini ASEAN memiliki tujuh perjanjian perdagangan bebas yang telah berjalan

---

<sup>1</sup> Widyasanti, Amalia Adininggar. 2010. *Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Hal 6.

diantaranya, *ASEAN Free Trade Area*; *ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement*; *ASEAN-India Regional Trade and Investment Area*; *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*; *ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement*; *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement* dan *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation Agreement*. Selain itu, *ASEAN-EU Free Trade Agreement* masih dalam tahapan negosiasi, sedangkan *Comprehensive Economic Partnership for East Asia (CEPEA/ASEAN+6)* dan *East Asia Free Trade Area (ASEAN+3)* telah diajukan (dalam tahapan konsultasi dan studi lanjut)<sup>2</sup>.

Secara normatif, upaya untuk memunculkan AFTA ini lahir dari pemikiran tentang bagaimana meningkatkan hubungan (dan juga kerjasama), khususnya dalam bidang ekonomi, yang erat di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dipandang sebagai salah satu perwujudan dari tujuan bersama ASEAN, sebagaimana yang termuat di dalam Deklarasi Bangkok pada pasal 2 ayat 5, yaitu "*To collaborate more effectively for the greatest utilization of their agriculture and industries, the expansions of their trade, the improvement of their transportation and communication facilities, and the raising of the living standart of their people*"<sup>3</sup>.

Terdapat dua aspek mengenai kawasan perdagangan *ASEAN Free Trade Area* dalam masalah hubungan internasional, khususnya dalam bidang ekonomi-politik. Aspek yang pertama

adalah aspek regionalism, hal ini disebabkan karena membahas tentang ASEAN yang merupakan organisasi regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek liberalisasi perdagangan, hal ini disebabkan karena dalam AFTA ini sesungguhnya adalah bagian dari upaya penciptaan kawasan perdagangan bebas, yang memungkinkan masing-masing Negara untuk berdagang dengan negara lainnya secara bebas, tanpa dikenai hambatan tariff maupun non-tarif.

Pemberlakuan AFTA ini tentunya akan membawa dampak bagi pelaku ekonomi di setiap negara anggota. Dampak itu bersifat negatif bagi produsen (pelaku ekonomi) yang tidak (belum) efisien, yang selama ini selalu berlindung dibalik proteksi domestik namun bersifat positif bagi produsen (pelaku ekonomi) yang sudah efisien, karena dengan pemberlakuan AFTA tersebut pasar terbuka menjadi lebih lebar<sup>4</sup>.

Banyak negara-negara di dunia termasuk Indonesia, mencoba alternatif ke arah liberalisasi melalui kawasan perdagangan bebas di ASEAN (*ASEAN - Free Trade Area*) atau yang lebih dikenal dengan AFTA. AFTA awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2008 sesuai dengan pertemuan puncak negara-negara ASEAN tahun 1992 di Singapura. Jadwal pemberlakuan ini kemudian dipercepat lima tahun perdagangan bebas dalam wadah AFTA yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2003 bagi enam negara anggota lama ASEAN, yaitu Indonesia, Brunai Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Cepat atau lambat liberalisasi perdagangan akan menyebabkan pasar disemua Negara anggota ASEAN akan semakin terbuka, termasuk Indonesia.

<sup>2</sup> Widyasanti, Amalia Adininggar. 2010. *Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, hal 7.

<sup>3</sup> Isi Deklarasi ASEAN yang ditanda tangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan menjadi dasar bagi berdirinya ASEAN.

<sup>4</sup> Rifana Erni, 2003. *Strategi Menyongsong Era Perdagangan Bebas ASEAN Tahun 2003*, hal.15

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH ASEAN-Free Trade Area (AFTA) TERHADAP PERTUMBUHAN EKSPOR CPO INDONESIA 2003-2012.**”

#### **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana pengaruh *ASEAN-Free Trade Area* (AFTA) terhadap pertumbuhan ekspor CPO Indonesia Periode 2003-2012

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *ASEAN-Free Trade Area* (AFTA) terhadap pertumbuhan ekspor CPO Indonesia Periode 2003-2012.

#### **KERANGKA TEORI**

Setiap negara memiliki suatu kepentingan nasional (*national interests*) untuk memajukan negaranya serta mewujudkan kesejahteraan warganya. Dalam menghadapi perdagangan internasional yang semakin tak bisa terbendung dan menyeret semua negara yang dengan tujuan akhir perdagangan bebas, kepentingan mendasar Indonesia yakni adalah mendapatkan keuntungan dengan melakukan penetrasi pasar dan melindungi industri domestiknya.

Kepentingan nasional suatu negara idealnya merupakan representasi dari kepentingan semua elemen di dalam negara utamanya masyarakat secara keseluruhan. Kepentingan nasional dibentuk dengan mempertimbangkan kondisi domestik dan internasional. Hal ini kemudian menjadikan kepentingan nasional menjadi sebuah perdebatan besar menyangkut rumusan dan bentuknya. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pendapat tentang konsep ini bahwa kepentingan nasional merupakan kebijakan

yang telah disusun secara objektif dan rasional.

Perdagangan bebas didefinisikan Ricardo sebagai aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional yang akan membawa keuntungan bagi semua partisipan sebab perdagangan bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi meningkatkan efisiensi dan dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas.<sup>5</sup> Konsep perdagangan bebas didasarkan pada teori klasik yang menyatakan bahwa perdagangan yang terbaik adalah apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan apa yang terbaik dan kemudian menjual dalam iklim persaingan yang bebas dan terbuka. Strategi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang maksimal jika di produksi didasarkan pada pembagian kerja atau spesialisasi yang mengutamakan keunggulan mutlak setiap pihak.

Hal terpenting yang diyakini oleh para liberalisme sehingga mendukung perdagangan bebas yakni seperti yang diungkapkan oleh Ricardo bahwa pasar bebas dengan satu kesatuan kepentingan dan hubungan yang sama menyatukan himpunan bangsa yang universal melalui dunia yang beradab.<sup>6</sup> Tidak jauh berbeda dengan Ricardo, Cobden menyatakan bahwa pasar bebas adalah abadi dalam keberannya dan universal dalam aplikasinya. Pasar bebas merupakan kunci menuju keharmonisan dan perdamaian global.<sup>7</sup>

Perdagangan bebas dianggap dapat menciptakan pasar persaingan terbuka dan sehat bagi semua pihak yang terlibat didalamnya dan dapat menciptakan pasar

---

<sup>5</sup> Robert Jackson dan George Sorensen. 2009. *Pengantar Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 235

<sup>6</sup> David Ricardo. 1911. *The Principles of Political Economy and Taxation*. London, hal 114

<sup>7</sup> A. Arblaster. 1984. *The Rise and Decline of Western Liberalism*. Oxford, hal 261

persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan suatu kondisi dimana konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan dalam perdagangan karena tidak ada pihak yang dapat memonopoli pasar.

Ekspor CPO Indonesia mengalami peningkatan mengingat ketersediaan bahan baku yang melimpah dan banyaknya permintaan dari pasar Negara-negara di dunia terhadap CPO Indonesia. Hal ini sudah tentu akan membawa kepentingan nasional Indonesia akan semakin dikenal dan semakin menjamin penghasilan Negara yang besar dari ekspor CPO, selain ekspor bahan-bahan mentah lainnya. Ditambah kedudukan Indonesia di organisasi kawasan yakni ASEAN, kondisi ini akan semakin menguntungkan Indonesia.

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai suatu keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen<sup>8</sup>.

ASEAN merupakan salah satu organisasi regional yang tergolong dalam bentuk regionalisme lama. Asean didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Organisasi ini diprakarsai oleh lima negara yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia dan Kamboja. ASEAN di bentuk sebagai respon terhadap perkembangan

---

<sup>8</sup> Sjamsuar Dam dan Riswandi. 1995. Kerjasama ASEAN. Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 16.

sistem kekuatan dunia yang bipolar. Utamanya untuk memperjelas sikap politik kelima negara pada dua kekuatan dunia yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hal tersebut menggambarkan bahwa ASEAN sebagai forum regional di bentuk berdasarkan kerjasama politik.

Dalam perkembangannya, ASEAN mengalami transformasi dari kerjasama politik menuju kerjasama ekonomi. Hal ini ditandai dengan pembentukan PTA (1977) dan AFTA (1992). Oleh karena itu, pilar ekonomilah yang paling diutamakan dibandingkan dengan pilar yang lainnya. Aspek ekonomi semakin menjadi perhatian ketika terjadinya krisis ekonomi 1997 yang juga menimpa semua Asia termasuk ASEAN. Kemudian terjadinya pergerakan dan pergeseran transformasi dan transportasi secara besar-besaran terjadi, yang dilakukan untuk memudahkan perdagangan seperti pembebasan tarif bea masuk dan pajak disertai dengan masuknya praktisi asing yaitu itu tenaga kasar, ahli dari negara luar atau pun barang dari negara maju atau antar negara berkembang sendiri.<sup>9</sup> Hal ini tentu saja menyebabkan negara-negara harus berjuang untuk bertahan dari adanya pengaruh dunia luar. Terbentuknya organisasi regional semakin dikokohkan dengan adanya anggapan bahwa regionalisme dapat meningkatkan perekonomian nasional semakin menguatkan perekonomian nasional.

#### **HIPOTESA**

Pengaruh *ASEAN-Free Trade Area* terhadap Ekspor CPO Indonesia Periode 2003-2012 adalah meningkatkan peluang pasar dalam ekspor CPO menurut Negara tujuan utama di kawasan ASEAN dengan indikator sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> T. May Rudi. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma*. Bandung: Rafika Aditama. hal 37

1. Indonesia mampu meningkatkan nilai komoditi ekspor CPO tahun 2008-2013 untuk Negara kawasan Asia Tenggara khususnya Singapura dan Malaysia dengan rata-rata nilai ekspor untuk Singapura sebesar 729,38 ton dan rata-rata nilai ekspor untuk Malaysia sebesar 1.275,16 ton.
2. Indonesia mampu menjadi negara penghasil CPO nomor satu (terbesar) di dunia empat tahun lebih cepat dari prediksi sebelumnya, di mana Indonesia diperkirakan baru akan menjadi produsen CPO terbesar di dunia pada tahun 2010.

usaha untuk mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin tetapi juga bermaksud untuk menjelaskan bagaimana hubungan gejala dengan gejala atau fenomena lainnya dan mengapa hubungan itu terjadi. Fenomena yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh kebijakan *ASEAN Free Trade Area* terhadap pertumbuhan ekspor CPO Indonesia 2003-2012.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data-data yang dilakukan peneliti menggunakan studi kepustakaan (*Library research*), dengan merujuk pada buku-buku, artikel, journal, dan berita-berita media yang relevan. Dalam mengumpulkan data-data tersebut peneliti lebih banyak memanfaatkan media internet sebagai *source of data*, karena keterbatasan peneliti untuk mencari data-data yang original, ataupun untuk melakukan wawancara serta observasi langsung.

## METODOLOGI PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif research*, studi kualitatif ini konsisten dengan *qualitative paradigma*. John W. Craswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut “*an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informant and conducted in a natural setting*”<sup>10</sup>

Penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman suatu permasalahan sosial yang bersifat deskriptif. Dalam mengeksplorasi fenomena sosial tersebut peneliti mulai dari premis-premis yang bersifat khusus menuju sebuah generalisasi (proses induktif). Penelitian ini melihat hubungan sebab-akibat dari gejala-gejala yang diteliti dalam suatu latar yang bersifat ilmiah dengan teknik analisa, dimana penelitian ini tidak saja menerapkan

### Gambaran Umum ASEAN Free Trade Area

*Asean Free Trade Areas* (AFTA) istilah perdagangan bebas identik dengan adanya hubungan dagang antar negara anggota maupun negara non-anggota. Dalam implementasinya perdagangan bebas harus memperhatikan beberapa aspek yang mempengaruhi yaitu mulai dengan meneliti mekanisme perdagangan, prinsip sentral dari keuntungan komparatif (*comparative advantage*), serta pro dan kontra di bidang tarif dan kuota, serta melihat bagaimana berbagai jenis mata uang (atau valuta asing) diperdagangkan berdasarkan kurs tukar valuta asing<sup>11</sup>.

<sup>10</sup>John W. Creswell 1994, *Research Design Qualitative&Quantitative Approaches* India :Sage Publications. hal 4.

<sup>11</sup> AFTA. Dipetik pada tanggal 6 November 2014 dari Departemen Keuangan: <http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=AFTA>

AFTA sendiri singkatan dari *Asean Free Trade Area*. AFTA sendiri dibentuk lebih dulu dibandingkan dengan ACFTA, AFTA dibentuk pada tahun 1992 oleh negara-negara ASEAN, AFTA ini merupakan bentuk kesepakatan antar negara untuk membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional untuk 500 juta penduduk<sup>12</sup>. Dengan kata lain ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan antar negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi Negara-negara tersebut di kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi penduduknya.

Saat perjanjian AFTA ditandatangani secara resmi, ASEAN memiliki enam anggota yaitu Brunai, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 dan Kamboja pada tahun 1999. AFTA saat ini terdiri dari sepuluh Negara ASEAN. Keempat Negara pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Firda Faizatul Qomariah. Pengaruh Pasar Bebas Asean terhadap Beberapa Sektor di Negara-Negara Asean. Dipetik tanggal 6 November 2014 dari: <http://firdafaizatulqomariah.wordpress.com/2014/07/27/pengaruh-pasar-bebas-asean/>

<sup>13</sup> Maliaphiaphia.

<http://maliaphiaphia.blogspot.com/2012/06/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

## **Konsep dan Sistem Pelaksanaan ASEAN Free Trade Area**

ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema *Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

AFTA yang dicanangkan dengan instrumen CEPT yang diperkenalkan pada Januari 1992. ASEAN pada tahun 2002 mengemukakan bahwa komitmen utama dibawah CEP-AFTA hingga saat ini meliputi 4 program yaitu:

- a. Program pengurangan tingkat tarif yang secara efektif sama di antara negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5 persen.
- b. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif (*quantitative restrictions*) dan hambatan-hambatan non tarif (*non tariff barriers*)
- c. Mendorong kerjasama untuk mengembangkan fasilitas perdagangan terutama di bidang bea masuk serta standar dan kualitas.

d. Penetapan kandungan lokal sebesar 40 persen<sup>14</sup>.

Ide untuk menerapkan kawasan perdagangan bebas di ASEAN (*ASEAN Free Trade Area*) sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Thailand, tetapi pada saat itu kurang mendapat sambutan yang positif sesama anggota ASEAN, terutama Indonesia dan Filipina yang kondisi ekonominya masih lemah untuk penerapan perdagangan bebas. Akan tetapi, seiring berakhirnya “Perang Dingin” pada tahun 1991, dan ketegangan politik di Asia Tenggara juga berkurang. Oleh karena itu fokus perhatian dalam pertemuan ASEAN beralih kepada masalah ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Negara-negara anggota ASEAN. Kemudian, keinginan untuk memperoleh kesepakatan tentang *ASEAN Free Trade Area* mulai kembali dilakukan. Usul resmi PM Thailand yang menerangkan konsep *ASEAN Free Trade Area* pada KTT ASEAN di Singapura telah berhasil menyepakati bersama untuk melakukan perdagangan bebas yang dilakukan secara bertahap dan baru beroperasi penuh dalam waktu lima belas tahun.

#### **Kerjasama Perdagangan di Kawasan ASEAN Free Trade Area**

Kerjasama perdagangan di kawasan ASEAN secara resmi diumumkan pada 24 Februari 1977 yang disebut dengan *Preferential Trade Arrangement* (PTA) dan dalam perkembangannya menjadi *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). PTA mengusulkan pelaksanaan perdagangan bebas melalui lima cara<sup>3</sup>. Dari kelima cara yang diusulkan tersebut, hanya pengurangan tarif yang dilaksanakan cukup luas bagi barang-barang yang

diperdagangkan dan berasal dari negara-negara anggota ASEAN.

AFTA melalui CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan, untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Pada KTT ke-4 telah diputuskan bahwa AFTA akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1 Januari 1993-1 Januari 2008) dan hanya menyangkut produk manufaktur, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Sampai tahun 2002, tarif bea masuk impor yang dikenakan terhadap barang-barang yang diperdagangkan di antara kawasan ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) diturunkan sampai pada tingkat 0-5%, kecuali untuk produk sensitif, seperti beras, dan produk yang secara tetap dikecualikan, seperti narkotika dan substansi psikotropika. Komitmen Indonesia dibawah skema CEPT-AFTA menunjukkan bahwa pada 2003 sekitar 99,07% tarif CEPT Indonesia telah berada pada kisaran 0-5%. Disamping itu, kesepakatan dalam AFTA tidak hanya untuk menurunkan tarif tetapi juga penghapusan hambatan kuantitatif (*quantitative restriction*) dan hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*).

Pada pertemuan 12 Juli 2003 di Jakarta, disepakati percepatan integrasi terhadap 11 sektor prioritas ASEAN. Selanjutnya untuk masing-masing sector prioritas tersebut, tarif akan diturunkan hingga nol, hambatan non tariff dihapuskan, dan batasan nilai tukar terhadap produk-3 Kelima cara tersebut adalah menyetujui pengurangan tarif, kontrak jangka panjang, pendanaan impor dengan syarat-syarat yang lunak, mengutamakan pembelian yang dilakukan oleh pemerintah, dan pembebasan dari

<sup>14</sup> Ibid.

hambatan non tariff dalam perdagangan di ASEAN. Ke sebelas sektor prioritas ASEAN tersebut meliputi produk kayu, otomotif, produk karet, tekstil, garmen, produk pertanian, produk perikanan, elektronik, produk kesehatan, transportasi udara, dan pariwisata. Disamping itu, dengan makin keterikatannya dalam dunia global maka Indonesia juga terikat dengan aturan dalam WTO.

Hampir seluruh produk termasuk dalam jadwal komitmen dengan WTO, kecuali barang-barang tertentu seperti kendaraan bermotor, industri baja, pesawat udara, perkapalan, dan barang bersenjata (*arms and explosives*). Komitmen dengan WTO untuk barang-barang industri mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Menghilangkan tariff surcharge pada tahun 2004. Hal ini telah dilakukan Indonesia pada tahun 1996, jauh sebelum batas waktu yang ditetapkan.
- b. Menghilangkan seluruh hambatan non-tarif (NTB/non tariff barrier) pada tahun 2004. Indonesia telah meniadakan sebagian besar dari NTB sebelum putaran Uruguay berakhir
- c. Menjaga tarif yang berlaku dibawah batas maksimum yang ditetapkan dalam komitmen WTO. Pada kenyataan, sebagian besar tarif produk industri Indonesia berada jauh di bawah tarif maksimum tersebut. Mengurangi tarif untuk produk-produk teknologi informasi sampai dengan 0%. Sesuai dengan jadwal penurunan tarif, sebagian besar tarif *line* (83,4%) sudah berada pada kisaran 0-10% pada 2003. Bahkan 67,9% dari total *tariff lines* telah diturunkan menjadi 0% atau 5%. Sementara, krisis nilai tukar yang berlanjut menjadi krisis finansial pada 1997 membuka kebijakan perdagangan yang harus sejalan dengan komitmen yang tertuang dalam *letter of Intent* (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF.

Pada intinya, perjanjian dalam LoI terikat pada pinjaman yang diberikan oleh IMF dan harus sudah dilaksanakan pada saat program IMF berakhir pada Desember 2002. Perlu dicatat, komitmen dalam LoI yang tidak diatur dalam penawaran Indonesia pada Putaran Uruguay sifatnya dapat ditarik kembali setelah program IMF berakhir.

### **Ekspor**

Ekspor akan memberikan efek yang positif ke atas kegiatan ekonomi Negara karena ia merupakan pengeluaran penduduk negara lain ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri<sup>15</sup>. Seperti juga dalam halnya dengan investasi dan pengeluaran pemerintah, ekspor juga digolongkan sebagai pengeluaran otonomi oleh karena pendapatan nasional bukanlah penentu penting dari tingkat ekspor yang dicapai sesuatu negara. Daya saing dipasar luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar dan kurs valuta asing merupakan faktor utama yang akan menentukan kemampuan suatu negara mengekspor ke luar negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 182/MPP/Kep/4/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean;
2. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor;
3. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu

<sup>15</sup> Sadono Sukirno. 2011. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 109.

- sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
  5. Barang Yang Diatur Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;
  6. Barang Yang Diawasi Ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk;
  7. Barang Yang Dilarang Ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor;
  8. Barang Yang Bebas Ekspornya adalah barang yang tidak termasuk pengertian butir e, f dan g.

Ekspor pada mulanya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berbentuk Badan Hukum yang telah mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan. Secara umum persyaratan untuk ekspor adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk mendapatkannya perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui Kantor Departemen Perdagangan (Kandepdag), atau
- b. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah non Teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Perkembangan Ekspor CPO Indonesia ke Negara Asean**

Ekspor komoditas CPO merupakan salah satu andalan perolehan devisa ekspor nasional. Seiring dengan peningkatan produksinya, volume ekspor CPO nasional selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2008 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tujuan utama ekspornya yaitu ke negara India, Belanda, China dan Singapura. Dilihat dari potensi pasarnya baik pasar domestik maupun pasar internasional, tampaknya pemasaran CPO masih cukup cerah. Indikasi prospek pemasaran CPO yang cerah ini antara lain dapat dilihat dari sisi konsumsi CPO yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan 7,65% per tahun di dunia, dan sekitar 8,25% per tahun di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia pada triwulan keempat tahun 2008, ekspor CPO Indonesia diserap sebanyak 34% oleh India, sementara Cina sebesar 11,6%<sup>16</sup>.

Seiring dengan perkembangan luas arealnya, produksi kelapa sawit dalam wujud minyak sawit (CPO) juga cenderung meningkat selama tahun 2000-2011 (Gambar 2). Jika tahun 2000 produksi minyak sawit Indonesia hanya sebesar 7,00 juta ton, maka tahun 2011 meningkat menjadi 22,51 juta ton. Peningkatan produksi minyak sawit terutama terjadi pada PBS dan PR, sedangkan minyak sawit yang diproduksi oleh PBN relative konstan, bahkan cenderung menurun. Untuk tahun 2011 produksi minyak sawit dari PBS mencapai 11,94 juta ton (53,06%), sedangkan PR dan PBS masing-masing menghasilkan minyak sawit sebesar 8,63 juta ton (38,33%) dan 1,94 juta ton (8,61%)<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Adella Bactiar. 2010. Analisis Pergerakan Ekspor CPO ke Negara Malaysia. Jakarta: Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hal 40.

<sup>17</sup> Ibid, Hal 2.

Penurunan *trade balance* di atas disebabkan kinerja perdagangan global Indonesia, terutama karena menurunnya sumbangan surplus *trade balance* non migas. Surplus *trade balance* pada tahun 2000 sebagian besar (78,50 persen) disumbang oleh sektor non migas. Berkenaan dengan laju pertumbuhan impor non migas yang lebih tinggi dari laju ekspor non migas, maka sumbangan surplus *trade balance* sektor non migas pada tahun 2010 turun menjadi 63,94 persen. Lebih lanjut, komoditas ekspor Indonesia dalam periode 2000-2010 mengalami perubahan. Pada tahun 2000 Indonesia didominasi barang-barang elektronik dan mesin mekanik. Namun pada tahun 2010 ekspor Indonesia didominasi barang-barang tambang, terutama batubara dan hasil perkebunan terutama CPO, karet dan produk karet.

#### **Pengaruh Asean Free Trade Area terhadap Ekspor CPO Indonesia**

Di kawasan Asia Tenggara, regionalisme bermula dari terbentuknya Association of South East Asian Nations (ASEAN) di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dapat dikatakan, inilah embrio awal dari terintegrasinya perekonomian negara-negara di kawasan itu. Seiring dengan pergeseran sistem perekonomian dunia ke arah liberalisasi pada awal 1990-an, wacana mengenai perdagangan bebas juga turut bergulir di kalangan negara-negara anggota ASEAN. Indikasinya, terjadi kesepakatan pada pertemuan negara-negara anggota ASEAN di Singapura (1992) untuk memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan tersebut secara formal telah disepakati terbentuknya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA)<sup>18</sup>. AFTA kemudian

---

<sup>18</sup> Jens-Uwe Wunderlich. 2007. *Regionalism, Globalisation and International Order*. England.

menjadi salah satu bentuk kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN yang menghendaki terciptanya sebuah kawasan perdagangan bebas yang berisikan program komprehensif untuk mereduksi tarif regional<sup>19</sup>.

Untuk melihat signifikansi pengaruh AFTA terhadap ekspor CPO Indonesia maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelum AFTA

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu produk yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, komoditas ini berhasil menyumbangkan devisa pada pendapatan negara pada sebesar lebih dari US\$ 16,4 miliar pada 2010 yang mengalami peningkatan 50% dari tahun 2009.<sup>20</sup> Suatu angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan sumbangsih sektor non-migas lainnya. Industri kelapa sawit merupakan sektor Industri terbesar kedua setelah pertanian khususnya padi.

Sejak tahun 2005, sekitar 1,3 juta ha lahan baru dijadikan perkebunan kelapa sawit dan dengan cepat mencapai hampir 5 juta ha pada 2007.<sup>21</sup> Perluasan luar biasa ini dipicu oleh permintaan yang semakin besar atas minyak kelapa sawit mentah beserta produk turunannya. Di Indonesia, kelapa sawit dibudiyakan di 17 provinsi

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Raksasa CPO di Indonesia Makin Agresif Ekspansi, <http://duniaindustri.com/agroindustri/440-raksasa-cpo-di-indonesia-makin-agresif-ekspansi.html?tmpl=component&print=1&page=>, di akses 6 November 2014.

<sup>21</sup> *Laporan World Growth* Februari 2011 (World Growth Palm Oil Green Development Campaign). *Manfaat Minyak Sawit bagi Perekonomian Indonesia*. Melalui [http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG\\_In\\_donesian\\_Palm\\_Oil\\_Benefits\\_Bahasa\\_Report-2\\_11.pdf](http://www.worldgrowth.org/assets/files/WG_In_donesian_Palm_Oil_Benefits_Bahasa_Report-2_11.pdf), diakses tanggal 17 November 2014

meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Akan tetapi, pulau Sumatera merupakan wilayah dengan area perkebunan kelapa sawit total area perkebunan yang terbesar Indonesia kemudian diikuti oleh Kalimantan. Dan apabila produksi kelapa sawit di hitung berdasarkan provinsi maka, Riau merupakan provinsi penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 24% dari produksi nasional pada tahun 2009, sementara Jambi menyumbang minyak sawit sebesar 7,70% dari produksi nasional dengan luas lahan mencapai 8,82% dari luas lahan nasional.<sup>22</sup>

Sesudah AFTA

Memasuki tahun 2010, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan, produksi minyak sawit Indonesia akan naik melampaui produksi pada 2009 yang akan menembus angka 22 juta ton.<sup>23</sup> Namun, berdasarkan publikasi dari data statistik Ditjen Perkebunan, produksi CPO hanya mencapai 19,76 juta ton dengan seluas 8,04 juta ha.<sup>24</sup> Hal ini berarti terdapat penurunan dalam kapasitas produksi CPO Indonesia bila dibandingkan dengan tahun 2009. Padahal permintaan terhadap CPO masih tinggi dengan harga US\$ 1.000-1.200 per ton.<sup>25</sup>

Harga CPO dunia pada bulan Januari 2011 cenderung mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan harga

CPO sebesar 2.9% pada bulan Januari 2011 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan harga bulan Januari 2010 maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai sebesar 62.3%. Peningkatan harga tersebut disebabkan meningkatnya permintaan CPO dari RRT menjelang tahun baru Imlek yang dikhawatirkan akan meningkatkan harga karena kurangnya pasokan. Selain itu masih adanya dampak cuaca buruk pada daerah penghasil CPO dimana curah hujan yang tinggi di Malaysia memperlambat produksi *vegetable oil* pada saat permintaan global meningkat. Rendahnya produksi di Indonesia dan Malaysia karena curah hujan tinggi membuat stok akhir bulan rendah. Selain itu juga karena Indonesia akan menaikkan pajak ekspor dari 20 % menjadi 25% di bulan Februari.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya mengenai pengaruh ASEAN Free Trade Area terhadap pertumbuhan ekspor *crude palm oil* Indonesia 2003-2012 dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut:

ASEAN menyadari akan integrasi ekonomi yang tidak bisa dihindari. ASEAN berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya melalui kebijakan perjanjian ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). Kerjasama regional dalam bentuk organisasi regional masih menjadi pilihan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk menghadapi perkembangan hubungan internasional yang kompleks dan adanya anggapan bahwa regionalisme dapat meningkatkan tingkat perekonomian.

Indonesia terkenal sebagai salah satu negara produsen CPO terbesar di dunia bersama Malaysia. CPO merupakan salah satu jenis dari produk kelapa sawit.

<sup>22</sup> Oil World. 2009. *Oil World Annual Report 2009*. Hamburg, Jerman: ISTA Mielke GmbH. Langenberg.

<sup>23</sup> Caroline Damanik. Op.cit

<sup>24</sup> *Ekspor Kelapa Sawit Capai 19, 76 juta ton*, <http://wartapedia.com/bisnis/finansial/1584-ekspor-kelapa-sawit-capai-1976-juta-ton.html>, diakses pada tanggal 21 September 2014.

<sup>25</sup> *Harga Kelapa Sawit Kian Tinggi di 2011*, <http://forum.detik.com/harga-kelapa-sawit-kian-tinggi-di-2011-t242839.html>, diakses tanggal 10 November 2014

Diberlakukannya AFTA mampu mempengaruhi Industri kelapa sawit khususnya komoditi CPO namun tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan dalam total produksi dan ekspor CPO dan peningkatan tersebut turut mempengaruhi peningkatan ekspor CPO Indonesia secara keseluruhan.

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi AFTA guna melindungi industri kelapa sawit yaitu menaikkan bea keluar CPO. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang besar seiring dengan tingginya permintaan CPO yang juga turut meningkatkan harga komoditi tersebut. Pasca berlakunya AFTA, terdapat sejumlah peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit. Peluang untuk industri kelapa sawit khususnya komoditi CPO sangat besar untuk melakukan ekspansi pasar melalui pengembangan ekspor maupun produksinya, bila dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh industri tersebut.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

Diperlukan pengembangan riset untuk mengembangkan CPO menjadi produk olahan yang lebih bernilai tinggi dan terus meningkatkan kuantitas produksi kelapa sawit.

Pemerintah harus membuat regulasi yang tepat dan pasti untuk menunjang masuknya investasi domestik dan asing guna pengembangan produksi kelapa sawit. Karena ketidakpastian hukum akan membuat para investor ragu untuk berinvestasi sehingga akan menghambat perkembangan CPO.

Peluang industri kelapa sawit diharapkan dengan memfokuskan pada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki. Indonesia memiliki kemampuan produksi yang lebih dibandingkan dengan negara-negara

produsen lainnya seperti Malaysia, Thailand, Papua Nuginie, Nigeria. Hal ini di dukung oleh ketersediaan lahan Indonesia yang masih mencukupi dan belum banyak digarap. Kemampuan produksi kelapa sawit Indonesia tentu saja akan meningkatkan daya ekspor dan produksi Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

Budi Raharjo. *Produksi CPO 2011 Diperkirakan Capai 23 Juta Ton*, , <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/11/10/145612-produksi-cpo-2011-diperkirakan-capai-23-juta-ton> diakses tanggal 10 November 2014

*Ekspor Kelapa Sawit Capai 19, 76 juta ton*, <http://wartapedia.com/bisnis/finansial/1584-ekspor-kelapa-sawit-capai-1976-juta-ton.html>, diakses pada tanggal 21 September 2014.

*Harga Kelapa Sawit Kian Tinggi di 2011*, <http://forum.detik.com/harga-kelapa-sawit-kian-tinggi-di-2011-t242839.html>, diakses tanggal 10 November 2014

Ilham Satriadi. 2014. Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Eksport *Crude Palm Oil* (CPO) ke Pakistan Tahun 2007-2013. *Jom Fisip* Vol. 1 No. 2 – Oktober 2014. Universitas Riau.

Kartika Runiasari, *Penerimaan Bea Keluar Naik 400 Persen*, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/09/12/96173/Berkat-CPO-Penerimaan-Bea-Keluar-Naik-400-Persen>, diakses pada tanggal 12 November 2014.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2011. *Industri Hilir*

- Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: PT. Mitra Media Nusantara.
- Laporan Market Intelligence: *Industri Palm Oil di Indonesia November 2009*, melalui: <http://www.datacon.co.id/CPO-2009Daftar.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 13.56 WIT
- Radian, MS., *Kenapa Produk Turunan Kelapa Sawit Kita Mandeg?*, <http://inspirasiablog.wordpress.com/2011/12/05/kenapa-produk-turunan-kelapa-sawit-kita-mandeg/>, diakses 14 November 2014
- R Ghita Intan Permatasari, *Produksi Kelapa Sawit RI Bakal Naik Jadi 25 Jt Ton.*, <http://economy.okezone.com/read/2012/01/04/320/551416/produksi-kelapa-sawit-ri-bakal-naik-jadi-25-jt-ton>. Diakses pada tanggal 10 November 2014
- Susila, W. R. 2000. 'Dampak Putaran Uruguay terhadap perdagangan komoditas kopi, kakao, dan minyak sawit', Karmawati, E. *et al.* (eds), Prosidi Simposium III, Penerapan Iptek untuk Meningkatkan Daya Sa Industri Perkebunan Indonesia, Puslitbang Tanaman Perkebunan APPI.
- Buku**
- Gilpin, Robert. 2001. "The Nature of Political Economy", dalam *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, Princeton: Princeton University Press.
- Juwana, Hikmahanto *AFTA Dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional*
- Ilham Satriadi. 2014. Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Eksport Crude Palm Oil (CPO) ke Pakistan Tahun 2007-2013. Jom Fisip Vol. 1 No. 2 – Oktober 2014. Universitas Riau.
- Plano, Jack C. Robert E. Riggs. Helenan S. Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Creswell, John W. 1994, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches* India : Sage Publications.
- Mohtar Mas' oed, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin & Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3S. Indonesia.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2013. Informasi Ringkas Komoditas Perkebunan. No. 01/01/I. 7 Januari 2013.
- Rifana Erni, 2003. *Strategi Menyongsong Era Perdagangan Bebas ASEAN Tahun 2003*
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 2009. *Pengantar Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jens-Uwe Wunderlich. 2007. *Regionalism, Globalisation and International Order*. England.
- Sadono Sukirno. 2011. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dominick, Salvatore. 2004. *Ekonomi Internasional*. Edisi Kelima. Erlangga Jakarta.
- Raksasa CPO di Indonesia Makin Agresif Ekspansi, <http://duniaindustri.com/agroindustri/440-raksasa-cpo-di-indonesia-makin-agresif-ekspansi.html?tmpl=component&print=1&page=>, di akses 6 November 2014.
- Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi RI pada Gelar Teknologi

- Industri Kelapa Sawit, BPPT, 18-19 Juli 2007.
- Sim Singer, J. David (1961). "The Level-Of-Analysis Problem in International Relations" *World Politics* 14 (1): pp 77-92.
- Soediyono. 1999. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- Susila, W. R. (2000). 'Dampak Putaran Uruguay terhadap perdagangan komoditas kopi, kakao, dan minyak sawit', Karmawati, E. et al. (eds), *Prosidi Simposium III, Penerapan Iptek untuk Meningkatkan Daya*
- SaIndustri Perkebunan Indonesia, Puslitbang Tanaman Perkebunan APPI.
- T. May Rudy. 2002. *Studi Strategis "Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin"*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Widyasanti, Amalia Adininggar. 2010. *Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan.